



**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JEMBER
(APLIKASI *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*)**

SKRIPSI

Oleh
Henggarsyah Aria Utama
NIM 110810101075

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JEMBER
(APLIKASI *ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS*)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh
Henggarsyah Aria Utama
NIM 110810101075

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tidak terhingga atas terselesaikannya skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Hartiningsih dan Ayahanda Djarot Aris Pramono, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan shalat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

(Al-Baqarah: 153)

“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu’. Dan jika memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya”.

(Umar bin Khattab)

“Dan saat Anda menyentuh batas, sesuatu terjadi dan tiba-tiba Anda dapat pergi sedikit lebih jauh lagi. Dengan kekuatan pikiran, tekad, naluri dan juga pengalaman, Anda dapat terbang sangat tinggi”.

(Ayrton Senna)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Henggarsyah Aria Utama

NIM : 110810101075

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:”Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jember (Aplikasi *Analytical Hierarchy Process*)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Henggarsyah Aria Utama

NIM 110810101075

SKRIPSI

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN JEMBER
(APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)**

Oleh

Henggarsyah Aria Utama
NIM 110810101075

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Anifatul Hanim, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Dr. M. Adenan, MM.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jember
(Aplikasi *Analytical Hierarchy Process*)
Nama Mahasiswa : Henggarsyah Aria Utama
NIM : 110810101075
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Regional
Tanggal Persetujuan : 12 Oktober 2015

Pembimbing I

Dra. Anifatul Hanim M.Si.
NIP. 196507301 199103 2 00 1

Pembimbing II

Dr. Moh. Adenan M.M.
NIP. 19661031 199203 1 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 19641108 198902 2 001

**PENGESAHAN
JUDUL SKRIPSI
STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN
JEMBER (APLIKASI ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Henggarsyah Aria Utama

NIM : 110810101075

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

6 November 2015

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

1. Ketua : Drs. Badjuri M.E. (.....)
NIP. 195312251984031002
2. Sekretaris : Dr. Siswoyo Hari Santosa S.E., M.Si. (.....)
NIP. 196807151993031001
3. Anggota : Dra. Nanik Istiyani M.Si (.....)
NIP. 196101211987022002

Foto 4 X 6

warna

Mengetahui/Menyetujui,
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, SE., M. Si
NIP. 19630614 199002 1 001

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jember
(Aplikasi *Analytic Hierarchy Process*)

Henggarsyah Aria Utama

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Jember

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, oleh sebab itu upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Masalah kemiskinan juga memiliki dampak negatif seperti timbulnya masalah sosial dan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menjadi faktor penghambat.

Penelitian ini merumuskan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat digunakan sebagai strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Tujuan penelitian ini untuk melihat alternatif kebijakan yang diprioritaskan sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember.

Hasil analisis *Analytic Hierarchy Process* (AHP) menjelaskan dari lima kriteria yang dipertimbangkan dalam strategi penanggulangan kemiskinan, prioritas pertama adalah berbasis pemberdayaan masyarakat, prioritas kedua adalah berberbasis program pro-rakyat, prioritas ketiga adalah berbasis pemberdayaan usaha ekonomi, dan prioritas terakhir yaitu bantuan dan perlindungan sosial.

Kata Kunci : Strategi, Kemiskinan..

Poverty Reduction Strategy In Jember Regency (Application Of Analytical Hierarchy Process)

Henggarsyah Aria Utama

*Department of Development Economics, Faculty of Economics,
University of Jember*

ABSTRACT

Poverty is a multidimensional issue, and therefore the fight against poverty must be comprehensive, covering various aspects of community life and implemented on an ongoing basis. The problem of poverty also have negative effects such as the emergence of social problems and can affect the economic development of a country. High poverty will cause costs to be greater economic development, thus indirectly be a limiting factor.

This study formulating policy alternatives that can be used as a strategy in poverty alleviation efforts in Jember. The purpose of this study was to look at alternative policies that prioritized as a strategy for poverty reduction in Jember.

Results of the analysis of Analytic Hierarchy Process (AHP) describes the five criteria were considered in the poverty reduction strategy, the first priority is based on community empowerment, the second priority is pr-rakyat programs, third priority is the empowerment based economic enterprises, and priority Last namely assistance and social protection.

Keywords: *Strategy, Poverty.*

RINGKASAN

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Jember (Aplikasi *Analytical Hierarchy Process*); Henggarsyah Aria Utama; 110810101075; 2015; Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Kemiskinan adalah permasalahan *multidimensional*, artinya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, akses terhadap barang dan jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki keterkaitan, antara lain kesehatan, pendidikan, lokasi dan geografis, gender maupun lingkungan. Permasalahan kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Esensi kemiskinan menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan. Kemiskinan muncul disaat masyarakat selalu mempunyai kekurangan baik material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi dan teknologi. Fakta bahwa kemiskinan terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimanya, ribuan pekerja berunjuk rasa memprotes ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemiskinan bersumber pada : a) diskriminasi terhadap kelompok minoritas, b) hanya sedikit memiliki kekayaan berupa barang tak bergerak, c) latar belakang rumah yang tidak menguntungkan, d) hambatan memperoleh pendidikan, kesempatan

kerja atau pengalaman. Masalah kemiskinan juga memiliki dampak negatif seperti timbulnya masalah sosial dan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menjadi faktor penghambat.

Gabungan pengertian diatas menggambarkan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi yang tepat dan efektif dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan di Kabupaten Jember. Metode analisis yang digunakan yaitu *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Hasil analisis AHP menunjukkan bahwa strategi berbasis pemberdayaan masyarakat (nilai bobot 0,372) dengan alternatif program PNPM Mandiri (nilai bobot 1,000) merupakan faktor paling penting yang harus dioptimalkan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember. Berikutnya yaitu strategi berbasis program pro-rakyat (nilai bobot 0,241) dengan alternatif kendaraan umum dan listrik murah (nilai bobot 0,355), peningkatan kehidupan nelayan dan masyarakat pinggir perkotaan (nilai bobot 0,355), program literasi keuangan untuk masyarakat pedesaan dan pinggir perkotaan (nilai bobot 0,145), sosialisai pengenalan teknologi dan informasi (nilai bobot 0,145). Prioritas selanjutnya yaitu strategi berbasis pemberdayaan usaha ekonomi (nilai bobot 0,234) dengan alternatif program KUR (nilai bobot 0,833), bantuan peralatan untuk industri kecil menengah (0,167). Prioritas terakhir adalah strategi berbasis bantuan dan perlindungan sosial (nilai bobot 0,153) dengan alternatif Program Keluarga Harapan (nilai bobot 0,380), bantuan beras untuk keluarga miskin (nilai bobot 0,237), bantuan beasiswa pendidikan (BSM) (nilai bobot 0,217) dan BPJS kesehatan (nilai bobot 0,167).

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulisan skripsi dengan judul “Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Jember (Aplikasi *Analytical Hierarchy Process*)” dapat diselesaikan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Strata 1 (S1), Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra. Anifatul Hanim, M.Si dan Bapak Dr. M. Adenan, MM selaku Dosen Pembimbing I dan II yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini, saran dalam melakukan perbaikan guna penyempurnaan penulisan skripsi ini, dan pengarahan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kesabaran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Siti Komariyah S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah membimbing penulis dalam masa perkuliahan.
3. Ibu Dr. Sebastiana Viphindartin, M.Kes selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;
4. Bapak Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Orang tuaku, Ibunda Hartiningsih dan Ayahanda Djarot Aris Pramono serta kakakku Yuanita Debby Artanti atas doa, dukungan, kasih sayang, selama pelaksanaan hingga terselesaikannya skripsi ini;

7. Teman-teman IESP 2011 maupun konsentrasi regional 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, persahabatan dan kasih sayang yang tak mungkin terlupakan ;
8. Seluruh staff karyawan di Fakultas Ekonomi, Perpustakaan Fakultas maupun Perpustakaan Pusat yang telah mempermudah dalam melakukan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna didunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya. Amiin.

Jember, 20 Oktober 2015

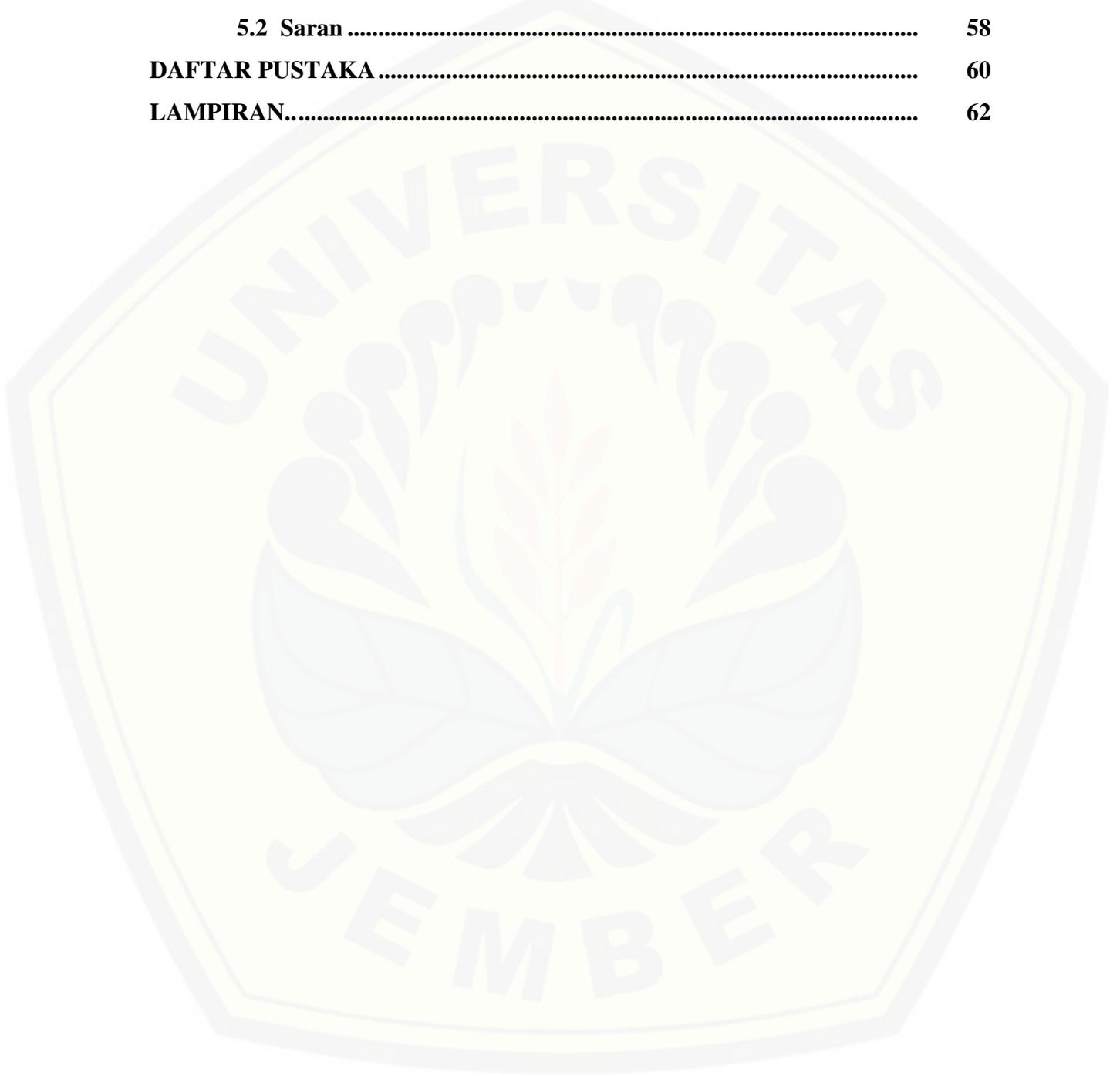
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN DOSEN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penulisan	8
1.4 Manfaat Penulisan.....	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan.....	9
2.1.2 Teori Kemiskinan Anne Booth dan Jhingan	10
2.1.3 Faktor Penyebab Kemiskinan Menurut Nurkse.....	11

2.1.4 Indikator Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik	15
2.1.5. Penyebab Kemiskinan Dari Sisi Ekonomi Menurut Sharp.....	16
2.1.6 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan.....	17
2.1.7 Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Tambunan.....	18
2.1.8 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.....	19
2.1.9 Peran dan Tugas TNP2K di Indonesia.....	21
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	23
2.2 Kerangka Pemikiran.....	27
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....	29
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	29
3.2 Unit Analisis, Populasi dan Sampel.....	29
3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.4 Data dan Metode Pengumpulan	30
3.4.1 Jenis Data.....	30
3.4.2 Sumber Data... ..	30
3.5 Metode Analisis Data.....	30
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	30
3.5.2 Analisis <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP)	31
3.6 Ruang Lingkup dan Batasan.....	37
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Jember	39
4.1.1 Kondisi Geografis.....	39
4.1.2 Kondisi Demografis	42
4.1.3 Kondisi Perekonomian.. ..	44
4.1.4 Kondisi Kemiskinan.....	45
4.2 Hasil Analisis Data.....	48
4.2.1 Hasil Analisis <i>Analytic Hierarchy Process</i> (AHP)	48
4.3 Pembahasan	53

BAB 5. PENUTUP	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

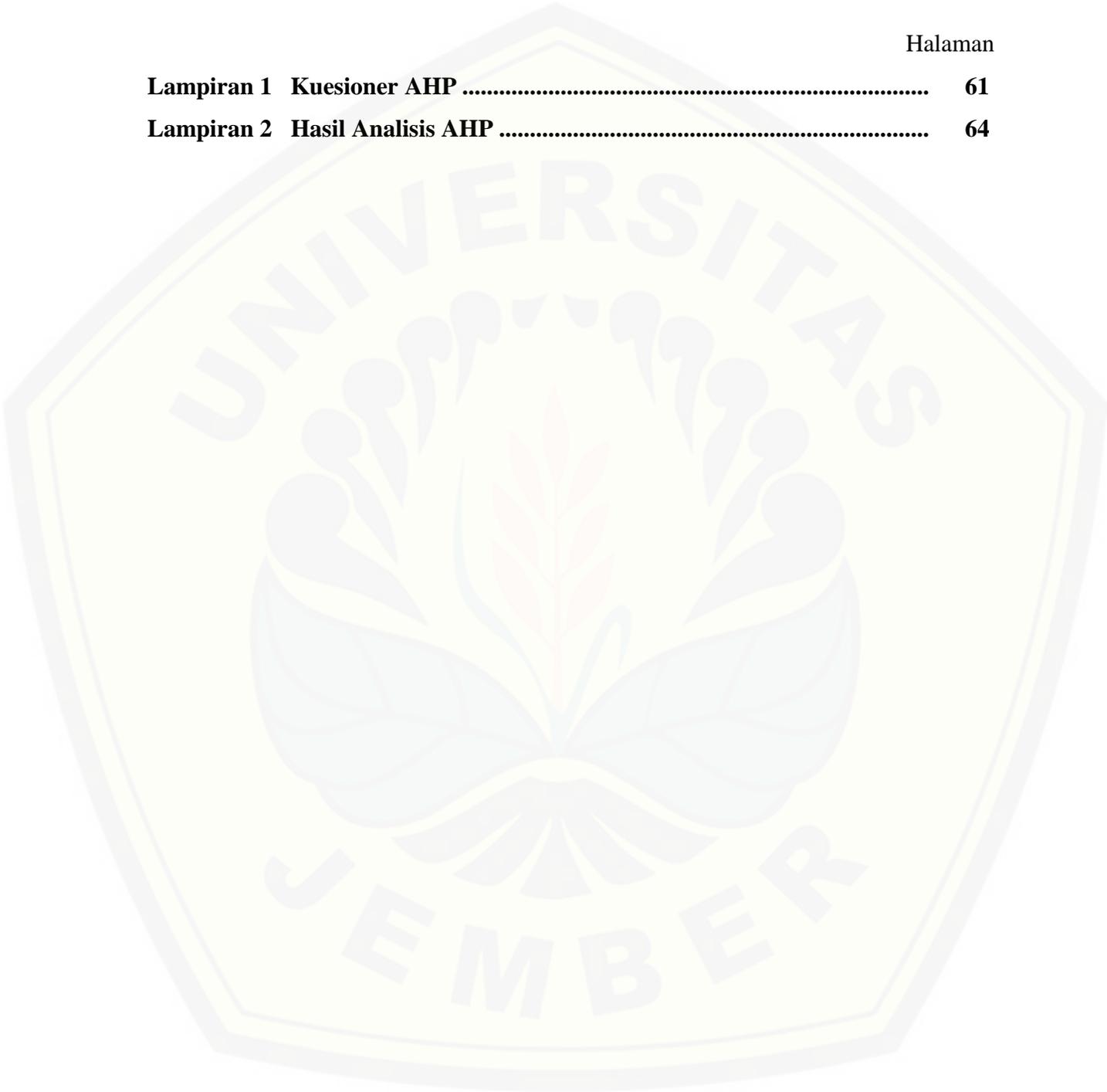
	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 5 Provinsi Di Indonesia	4
Tabel 1.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember..... Dengan Jawa Timur dan Nasional..	5
Tabel 1.3 Klasifikasi Masyarakat Miskin Kabupaten Jember	6
Tabel 2.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia	19
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 3.1 Skala Banding AHP Secara Bersamaan	34
Tabel 4.1 Wilayah Administratif Kecamatan Kabupaten Jember.....	41
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
Di Kabupaten Jember	42
Tabel 4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember	43
Tabel 4.4 Data Rumah Tangga Miskin Kab. Jember 2000-2012.....	45
Tabel 4.5 Data RTM Kecamatan Kabupaten Jember 2012.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (<i>The Vicious Circle of Poverty</i>)	14
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	29
Gambar 3.1 Bagan Proses Hirarki Analitik Strategi Penanggulangan Kemiskinan	36
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember	44
Gambar 4.2 Strategi yang Dipertimbangkan dalam Menanggulangi..... Kemiskinan Di Kabupaten Jember Beserta Nilai Bobotnya.....	48
Gambar 4.3 Alternatif dalam Strategi Berbasis Bantuan dan Perlindungan . Sosial Beserta Nilai Bobotnya	49
Gambar 4.4 Alternatif dalam Strategi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat . Beserta Nilai Bobotnya.....	50
Gambar 4.5 Alternatif dalam Strategi Berbasis Kelembagaan Beserta..... Nilai Bobotnya.....	51
Gambar 4.6 Alternatif dalam Strategi Berbasis Infrastruktur..... dan Lingkungan Beserta Nilai Bobotnya.....	52
Gambar 4.7 Alternatif dalam Strategi Berbasis Pemberdayaan Usaha	
Ekonomi Beserta Nilai Bobotnya..	53

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner AHP	61
Lampiran 2 Hasil Analisis AHP	64



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu proses dimensial yang mencakup perubahan struktur, sikap hidup dan kelembagaan, selain mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual (Todaro, 2000:19-20).

Pembangunan ekonomi diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan *Gross National Product* (GNP), baik secara agregat maupun per kapita yang akan menciptakan lapangan kerja dan berdampak pada peningkatan distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lebih merata. Prinsip tersebut dikenal dengan *trickle down effect*. Menurut Todaro (2006) indikator pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan GNP, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan maupun penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan ekonomi di daerah, kebijakan pemerintah melalui otonomi daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001 memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengelola keuangan sekaligus menentukan arah pembangunan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk di wilayahnya, dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti potensi, sumber daya serta faktor-faktor lainnya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat (Fatmasari, 2007).

Proses pembangunan ekonomi daerah memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada dengan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam hakekatnya, pembangunan daerah yang baik dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar, yaitu pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat. Pembangunan daerah haruslah dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah dengan akar dan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui pembangunan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu yang menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang ada dan mampu menaksir potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 1999). Salah satu faktor yang menjadi indikator sukses atau tidaknya pembangunan daerah adalah penurunan jumlah penduduk miskin. Pembangunan daerah yang diukur dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum tentu menjadi solusi atas terjadinya ketimpangan distribusi dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali tidak mencerminkan adanya pembangunan di suatu daerah. Mengacu pada penelitian Kuncoro (2014) bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 7,22 persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,50 persen. Namun dibalik keberhasilan pembangunan di Jawa Timur ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi yang mencemaskan yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi maupun pendidikan yang rendah. Tingkat kemiskinan Jawa Timur 14,23 persen, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen dan pendidikan di Jawa Timur sebesar 88,79 persen, lebih rendah dibanding pendidikan nasional sebesar 92,99 persen. Telihat bahwa upaya pemerintah baik pusat maupun

daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan dapat dikatakan masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Terjadinya kesenjangan antara rencana dengan pencapaian tujuan dikarenakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral. Strategi penanggulangan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan bersinergi sangat diperlukan sehingga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan secara tuntas. Kemiskinan adalah permasalahan *multidimensional*, artinya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi saja seperti tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, akses terhadap barang dan jasa, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang memiliki keterkaitan, antara lain kesehatan, pendidikan, lokasi dan geografis, gender maupun lingkungan. Permasalahan kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Sukmaraga, 2011).

Esensi kemiskinan menyangkut kondisi kekurangan dari sebuah tuntutan kehidupan yang paling minimum, khususnya dari aspek konsumsi dan pendapatan (Firdausi, 2010). Kemiskinan muncul disaat masyarakat selalu mempunyai kekurangan baik material maupun non material seperti kurang makan, kurang gizi, kurang pendidikan, kurang akses informasi dan teknologi. Fakta bahwa kemiskinan terutama di kota-kota besar seperti DKI Jakarta, dapat dilihat dari banyaknya warga masyarakat yang kekurangan makan dan minum, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, bahkan digusur dari pemukimanya, ribuan pekerja berunjuk rasa memperot es ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Samuelson dan Nordhaus (1989) mengatakan bahwa kemiskinan bersumber pada : a) diskriminasi terhadap kelompok minoritas, b) hanya sedikit memiliki

kekayaan berupa barang tak bergerak, c) latar belakang rumah yang tidak menguntungkan, d) hambatan memperoleh pendidikan, kesempatan kerja atau pengalaman. Masalah kemiskinan juga memiliki dampak negatif seperti timbulnya masalah sosial dan dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ekonomi menjadi lebih besar, sehingga secara tidak langsung menjadi faktor penghambat. Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat pembangunan ekonomi ternyata tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pemusatan penduduk miskin di Indonesia berada di Pulau Jawa, terutama di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Konsentrasi penduduk miskin Pulau Jawa mencapai rata-rata 57,5% dari total penduduk miskin di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, tidak merata bagi seluruh golongan masyarakat.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak 5 Provinsi di Indonesia 2013

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase (%)
Jawa Timur	4.865.820	12.73
Jawa Tengah	4.704.870	14.44
Jawa Barat	4.382.650	9.61
Sumatera Utara	1.390.800	10.39
Lampung	1.134.280	14.39

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan.

Tabel 1.1 menunjukkan jumlah penduduk miskin 5 provinsi di Indonesia. Secara umum jumlah penduduk miskin di Jawa Timur cukup tinggi yaitu sebesar 4,86 juta jiwa dengan presentase 12,73%. Tingginya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur berdampak rentannya penduduk terhadap krisis ekonomi. Menurut Sukirno (2006) perkembangan jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong maupun penghambat pembangunan. Menjadi faktor pendorong karena memungkinkan semakin banyaknya tenaga kerja. Kedua perluasan pasar, karena luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah

penduduk. Disebut faktor penghambat pembangunan karena akan menurunkan produktivitas, dan akan banyak terdapat pengangguran. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, jumlah penduduk yang besar justru akan memperparah tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan khususnya di Jawa Timur mempunyai keterkaitan yang erat. Sebagian ahli ekonomi berasumsi bahwa pertumbuhan yang cepat, akan berakibat buruk terhadap kaum miskin, karena mereka akan tergilas dan terpinggirkan oleh perubahan struktural pertumbuhan modern. Sebagian lain berpendapat bahwa konsentrasi penuh untuk pengentasan kemiskinan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, karena dana pemerintah akan habis untuk penanggulangan kemiskinan sehingga proses pertumbuhan ekonomi akan melambat (Todaro, 2000). Pertumbuhan ekonomi juga sangat berarti bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Menurut Siregar dan Wahyuniarti (2008), pertumbuhan ekonomi merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat merupakan indikator bahwa telah tercapainya tujuan dari pembangunan daerah. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Jember yang memiliki presentase pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat pada setiap tahun, hal tersebut membuktikan bahwa pemerintah kabupaten Jember telah berhasil dalam mengelola maupun memaksimalkan semua potensi baik sumber daya alam maupun tenaga kerja dalam rangka melaksanakan kebijakan otonomi daerah. Hal tersebut tercermin dari tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2009-2013

Tahun	Kabupaten Jember	Jawa Timur	Nasional
2009	5,55%	5,01%	4,55%
2010	6,04%	6,68%	6,10%
2011	7%	7,22%	6,50%
2012	7,21%	7,27%	6,23%
2013	6,63%	6,55%	5,78%

Sumber : Bappeda Kab. Jember

Dalam tabel 1.2 menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember dengan Jawa Timur dan Nasional. Terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada tahun 2009 sebesar 5,55%, pada tahun 2010, 2011, 2012 berturut-turut sebesar 6.04%, 7%, 7,21% sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 6,63%. Sementara pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 5.01%, 6.68%, 7.22%, 7.27% dan 6.55% dan pertumbuhan ekonomi Nasional pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 berturut-turut sebesar 4.55%, 6.10%, 6.50%, 6.23% dan 5.78%. Berdasarkan table 1.2, pada tahun 2009 dan 2013 pertumbuhan ekonomi kabupaten Jember lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun Nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat di Kabupaten Jember tidak diimbangi oleh pengurangan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data BPS Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) tercatat sebanyak 237.700 rumah tangga miskin yang berada di garis kemiskinan. Kabupaten Jember menempati urutan pertama daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur, sedangkan posisi kedua ditempati Kabupaten Bondowoso dan ketiga ditempati Kabupaten Malang (Purnomo, 2013). Presentase penerima raskin di Kabupaten Jember mencapai 192 ribu Rumah Tangga Sasaran (RTS). Sementara jumlah penerima program BPJS Kesehatan sebanyak 930 ribu jiwa. Berdasarkan data BPS Program

Perlindungan Sosial (PPLS) 2010 pengklasifikasian masyarakat miskin terdapat dalam tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3 Klasifikasi Masyarakat Miskin Kab. Jember Tahun 2010

Klasifikasi Miskin	Jumlah RTM
Hampir Miskin	109.496
Miskin	93.550
Sangat Miskin	34.654

Sumber : BPS PPLS 2010.

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah penduduk hampir miskin berjumlah 109.496, sedangkan jumlah penduduk kategori miskin 93.550 dan jumlah penduduk sangat miskin 34.654 RTM. Data dan statistik yang telah di kemukakan menunjukkan bahwa pembangunan yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember ternyata tidak sejalan dengan upaya mengurangi kemiskinan. Hal itu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat seharusnya dapat mengurangi kemiskinan, tetapi fakta yang terjadi di Kabupaten Jember yang memiliki pertumbuhan ekonomi cenderung meningkat tidak diimbangi oleh berkurangnya jumlah masyarakat miskin.

Berdasarkan realitas tersebut, perlu kiranya melakukan suatu analisis untuk mengidentifikasi dan mencari formulasi dalam upaya menanggulangi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Jember secara komprehensif yang bertujuan dapat mewujudkan kelangsungan hidup masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jember yang lebih baik, sejahtera adil dan makmur serta dapat memenuhi standart kebutuhan hidup yang layak. Dari uraian tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menetapkan arah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan mengenai permasalahan kemiskinan dalam latar belakang masalah diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Alternatif strategi seperti apa yang tepat dan efektif dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember ?
2. Strategi apa yang lebih diprioritaskan untuk diterapkan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Merumuskan alternatif-alternatif strategi yang tepat dan efektif dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember.
2. Menentukan skala prioritas untuk strategi penanggulangan kemiskinan yang dapat diterapkan di Kabupaten Jember.

1.3.2 Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk beberapa kepentingan, yaitu:

1. Sebagai bahan yang dapat bermanfaat bagi penulis dalam melaksanakan penelitiannya di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan wacana masyarakat tentang strategi dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember
3. Hasil penelitian dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan program apa yang tepat untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan, karena dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi disuatu daerah diharapkan dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi yaitu :

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Malthus

Gagasannya Thomas Robert Malthus terdapat pada buku berjudul “The Progress of Wealth” dari bukunya *Principle of Political Economy* pada tahun 1820. Malthus tidak menganggap proses pertumbuhan ekonomi berjalan dengan sendirinya, melainkan memerlukan usaha yang konsisten dari masyarakat. Dalam kaitan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, Malthus lebih realistis dalam menganalisa. Menurut Malthus pertumbuhan penduduk saja tidak cukup untuk berlangsungnya proses pembangunan ekonomi, sehingga diasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Artinya “jika pertumbuhan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding”. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga akan meningkat. Tentunya dengan kondisi yang demikian akan mendorong pertumbuhan penduduk, akan tetapi pertumbuhan penduduk saja tidak dapat meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan apabila pertumbuhan penduduk dapat meningkatkan permintaan efektif (*effective demand*). Malthus menganggap peranan produksi dan distribusi sebagai faktor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan apabila kedua faktor tersebut dapat dikombinasikan pada proporsi yang tepat, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi apabila kedua faktor tersebut dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan dalam proporsi yang tidak tepat, maka akan diperlukan waktu yang cukup lama untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kesimpulan dari teori yang dikemukakan oleh Malthus sebab utama keterbelakangan yaitu rendahnya tingkat konsumsi maupun kurangnya permintaan efektif. Untuk melakukan suatu pembangunan, haruslah memaksimalkan produksi di sektor pertanian dan sektor industri. Hal ini memerlukan kemajuan teknologi, pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, perluasan perdagangan internal dan eksternal, peningkatan konsumsi tidak produktif dan peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Selain faktor ekonomi, terdapat faktor non ekonomi seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik dan hukum yang efisien yang dapat membantu meningkatkan di dua sektor tersebut. Dapat dikatakan bahwa dua faktor yaitu faktor ekonomi dan non ekonomi berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan dua faktor yaitu ekonomi dan non ekonomi secara seimbang dan berkesinambungan akan memiliki dampak yang baik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena berbagai faktor yang dibutuhkan dalam hal peningkatan kesejahteraan telah terpenuhi, misalnya pendistribusian kesejahteraan dan tanah secara adil, peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum maupun faktor lain seperti pendidikan, standar moral, kebiasaan bekerja keras dan administrasi dan hukum yang baik dan efektif.

2.1.2 Teori Kemiskinan Anne Booth dan Jhingan

Teori tentang kemiskinan banyak dikemukakan oleh para ahli untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai faktor penyebab kemiskinan dalam berbagai perspektif, antara lain :

a. Teori Kemiskinan Anne Booth

Anne Booth (1996) berpendapat bahwa ada lima faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kelima faktor tersebut adalah faktor ekonomi yang terdiri dari kurang modal dan rendahnya teknologi. Kedua adalah faktor sosial budaya yang terdiri dari rendahnya keahlian dan pendidikan, terbatasnya kerja dan

adanya budaya miskin. Sementara faktor ketiga adalah geografi dan lingkungan yang terdiri dari keterisolasian wilayah, banyaknya penyakit dan kurang subur nya lahan. Faktor keempat adalah personal dan fisik terdiri dari umur, jenis kelamin, dan tingkat kesehatan perorangan. Faktor kelima adalah keterbatasan mengakses beberapa hal seperti produk pasar, fasilitas publik dan fasilitas kredit.

b. Teori Teori Kemiskinan Jhingan

Menurut Jhingan (dalam Purnomo, 2009) pemicu utama timbulnya kemiskinan suatu daerah adalah tingginya angka kelahiran atau bertambahnya jumlah penduduk, kedua faktor tersebut akan mempengaruhi penurunan fungsi lahan dan tingginya angka pengangguran. Sehingga angka kelahiran atau bertambahnya penduduk harus dapat ditekan, apabila angka kelahiran tetap tinggi maka hal tersebut secara otomatis mengakibatkan beban hidup akan bertambah. Selain itu, untuk menekan angka kemiskinan juga perlu dilakukan pemberian modal dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terhadap penguasaan Teknologi.

2.1.3 Faktor Penyebab Kemiskinan Menurut Nurkse

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara.

Pengertian kemiskinan dalam arti luas adalah keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi, serta suramnya masa depan bangsa dan negara. Dalam segala bidang selalu menjadi kaum tersingkir karena tidak dapat menyamakan kondisi dengan kondisi masyarakat sekitarnya. Negara-negara maju yang lebih menekankan pada kualitas hidup yang dinyatakan dengan perubahan lingkungan hidup melihat bahwa laju

pertumbuhan industri tidak mengurangi bahkan justru menambah tingkat polusi udara dan air, mempercepat penyusutan sumber daya alam dan mengurangi kualitas lingkungan. Sementara untuk negara- negara yang sedang berkembang, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi pada tahun 1960 sedikit sekali pengaruhnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dikarenakan kemiskinan itu bersifat *multi dimensional*, artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti kemajuan atau kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran aspek lainnya. Dan aspek lain dari kemiskinan ini adalah bahwa yang miskin itu manusianya baik secara individual maupun kolektif.

Kemiskinan menurut Nurkse (dalam Arsyad, 1999) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi dua pengertian:

1. Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara dan faktor-faktor

ekonomi lainnya. Walaupun demikian untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memnuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

2. Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

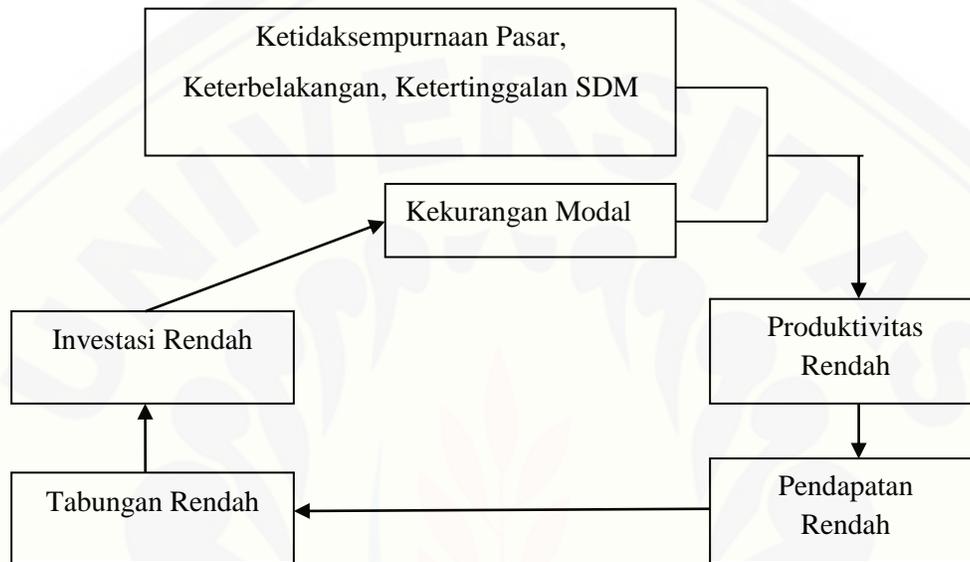
Oleh karena itu, kemiskinan dapat dilihat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

3. Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran atau rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa, sehingga menimbulkan suatu keadaan di mana suatu Negara akan tetap miskin dan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi,

baik investasi manusia maupun investasi kapital. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (dalam Kuncoro, 1997) yang mengatakan “*a poor country is a poor because it is poor*” (negara miskin itu miskin karena dia miskin).



Gambar 2.1 Lingkaran Kemiskinan (*The Vicious Circle of Poverty*)

Sumber: R. Nurkse (1953) dalam Kuncoro, 1997

Menurut Nurkse terdapat dua lingkaran perangkap kemiskinan, yaitu dari segi penawaran (*supply*) di mana tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang diakibatkan oleh produktifitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan untuk menabung rendah, menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, dan dengan demikian tingkat produktifitasnya juga rendah. Dari segi permintaan (*demand*), di negara-negara yang miskin perangsang untuk menanamkan modal sangat rendah, karena luas pasar untuk berbagai jenis barang adanya terbatas, hal ini disebabkan pendapatan masyarakat sangat rendah. Pendapatan yang rendah karena tingkat produktifitas yang rendah, sebagai wujud dari tingkatan pembentukan modal yang terbatas di masa lalu.

Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kekurangan perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya.

2.1.4 Indikator Kemiskinan Menurut Badan Pusat Statistik

Persepsi mengenai kemiskinan telah berkembang sejak lama dan sangat bervariasi antara budaya yang satu dengan budaya yang lainnya. Kriteria untuk membedakan penduduk miskin dengan yang tidak miskin mencerminkan prioritas nasional tertentu dan konsep normatif mengenai kesejahteraan. Namun pada umumnya saat negara-negara menjadi lebih kaya, persepsi mengenai tingkat konsumsi minimum yang bisa diterima, yang merupakan garis batas kemiskinan akan berubah.

Garis kemiskinan adalah suatu ukuran yang menyatakan besarnya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan kebutuhan non makanan, atau standar yang menyatakan batas seseorang dikatakan miskin bila dipandang dari sudut konsumsi. Garis kemiskinan yang digunakan setiap negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu garis kemiskinan yang berlaku umum. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), penetapan penghitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedang untuk pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Garis kemiskinan dibedakan menurut tempat dan waktu, jadi setiap daerah baik di desa maupun di kota memiliki nilai yang berbeda-beda dan biasanya nilai ini bertambah pada norma tertentu, pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan. Batas garis kemiskinan dibedakan antara desa dan kota. Perbedaan ini sangat signifikan antara di desa dan di kota, hal ini disebabkan pada perbedaan dan kompleksitas di desa dan di kota. Menurut Badan Pusat Statistik

(2010), penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Penetapan perhitungan garis kemiskinan dalam masyarakat adalah masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 7.057 per orang per hari. Penetapan angka Rp 7.057 per orang per hari tersebut berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita perhari. Garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan (luas lantai bangunan, penggunaan air bersih dan fasilitas tempat pembuangan air besar), pendidikan (angka melek huruf, wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah) dan kesehatan (rendahnya konsumsi makanan bergizi, kurangnya sarana kesehatan serta keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai).

2.1.5 Penyebab Kemiskinan Dari Sisi Ekonomi Menurut Sharp

Sharp (dalam Kuncoro, 1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi:

1. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan. Penyebab lain adalah masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air

minum dan sanitasi serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin yang disebabkan oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia dan yatim-piatu) dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai.

2.1.6 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

Terdapat 3 cara dalam menanggulangi kemiskinan menggunakan model untuk memobilisasi perekonomian pedesaan (dalam Setiawan, 2011):

1. Mendasarkan pada mobilisasi tenaga kerja yang masih belum didayagunakan (*idle*) dalam rumah tangga agar terjadi pembentukan modal di pedesaan (R. Nurkse, 1954). Idle adalah tenaga kerja yang belum didayagunakan merupakan sumber daya tersembunyi dan potensi tabungan. Alternatif cara yang dapat digunakan adalah; pertama, menggunakan pajak langsung atas tanah (berdasarkan prinsip progresif dan terbatas pada lapisan pendapatan yang tinggi). Contoh: Jepang. Kedua, menyusun kerangka kelembagaan di pedesaan. Metode ini diterapkan untuk proyek pembangunan infrastruktur dan padat karya. Contoh: RRC.
2. Menitikberatkan pada transfer sumber daya dari pertanian ke industri melalui mekanisme pasar (Lewis, 1954, Fei dan Ranis, 1964). Idle bahwa suplai tenaga yang tidak terbatas dari rumah tangga dapat meningkatkan tabungan dan pembentukan modal lewat proses pasar. Contoh: Taiwan (surplus pertanian diperoleh tanpa menggunakan instrumen pajak seperti Jepang, tetapi dilakukan dengan “pemaksaan” melalui kekuatan polisi untuk menopang industrinya)
3. Menyoroti potensi pesatnya pertumbuhan dalam sektor pertanian yang dibuka dengan kemajuan teknologi (modern) dan kemungkinan sektor pertanian menjadi sektor yang memimpin (Schultz, 1963, dan Mellor, 1976). Model ini dikenal dengan nama Model Pertumbuhan Berbasis Teknologi atau *Rural-Led*

Development. Proses ini akan berhasil apabila 2 (dua) syarat berikut terpenuhi: pertama, kemampuan mencapai tingkat pertumbuhan output pertanian yang tinggi. Kedua, proses ini menciptakan pola permintaan yang kondusif terhadap pertumbuhan. Selanjutnya, dampak berkaitan ekonomi antara sektor pertanian dan industri akan lebih kuat apabila proporsi kenaikan pendapatan dari pertumbuhan output pertanian bukan hanya dapat meningkatkan permintaan pangan tetapi juga komoditas dan jasa nonpertanian. Contoh: Jepang.

2.1.7 Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Tulus Tambunan

Terdapat 3 pilar utama yang dapat dijadikan sebagai strategi pengentasan kemiskinan menurut Tulus Tambunan (dalam Setiawan, 2011):

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan prokemiskinan.
2. Pemerintahan yang baik (*good corporate governance*).

Tertuang dalam prinsip tata pramong praja yang baik yaitu :

- a. Keadilan (*fairness*)
 - b. Keterbukaan (*transparency*)
 - c. Tanggung Gugat (*accountability*)
 - d. Tanggung Jawab (*responsibility*)
3. Pembangunan sosial terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Strategi lain yang dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan yaitu :

1. Perubahan struktural dan ketenagakerjaan.

Transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan dari sektor industri ke sektor jasa akan mampu menyerap tenaga kerja baru yang lebih banyak dan lebih berkualitas.

2. Memperluas kesempatan kerja

Pelaksanaan proyek-proyek padat karya baik yang bersifat komersial maupun sosial akan mampu menyerap tenaga kerja yang lebih banyak dan beragam keterampilannya.

3. Redistribusi pendapatan

Pajak dan subsidi dapat difungsikan sebagai sarana untuk lebih pemeratakan lagi distribusi pendapatan nasional dalam bentuk penyediaan barang-barang publik dan infrastruktur yang lebih baik.

2.1.8 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia

Kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu :

1. Kebijakan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin.
2. Kebijakan yang secara langsung mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran.
3. Kebijakan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya khusus.

Secara garis besar, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dapat dibedakan antara sebelum krisis ekonomi tahun 1998 dengan sesudah krisis ekonomi tahun 1998. Sebelum krisis ekonomi tahun 1998, kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), sedangkan setelah krisis ekonomi 1998 diperkenalkan program-program yang terangkum dalam Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Tabel 2.1 Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Sebelum Krisis Ekonomi 1998	Sesudah Krisis Ekonomi 1998
Dasar Hukum : Kepres No.5 Tahun 1993 Program Inpres Desa Tertinggal (IDT)	Dasar Hukum : Undang-Undang APBN Jaring Pengaman Sosial (JPS atau <i>Social Safety Net</i>)

Sumber: Setiawan, 2011.

Program IDT bertujuan memicu dan memacu gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, meningkatkan pemerataan atau menciutkan jurang antara si kaya dan si miskin, dan menggerakkan ekonomi rakyat. Sasarannya adalah penduduk miskin yang tersebar di 28.376 desa tertinggal. Siapa saja yang termasuk kategori penduduk miskin ditentukan oleh warga masyarakat sendiri berdasarkan musyawarah desa. Prinsip pengelolaan Program IDT adalah:

1. Keterpaduan
2. Kepercayaan
3. Kebersamaan
4. Kegotong-royongan
5. Kemandirian
6. Ekonomis
7. Berkelanjutan

Sementara program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah jaring pengaman atau penyelamatan masyarakat, keluarga dan perorangan yang sedang dalam kesusahan akibat dampak negatif krisis ekonomi.

Program-program JPS antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan (operasi khusus beras murah).
2. Penciptaan lapangan kerja (proyek padat karya).
3. Perlindungan sosial (kesehatan dan pendidikan).
4. Pengembangan ekonomi rakyat (UMKM dan koperasi).

Prinsip Pengelolaan Program JPS adalah sebagai berikut:

1. Penyaluran Dana Cepat (*Quick Disbursement*)
2. Terbuka (*Transparency*)
3. Dapat Dipertanggungjawabkan (*Accountable*)
4. Berkelanjutan (*Sustainable*)

Contoh program dan proyek-proyek JPS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE)
2. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

3. Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)
4. Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Inpres No.2/1998 tentang Gerdu Taskin)
5. Proyek Padat Karya Sektor Kehutanan
6. JPS bidang kesehatan dan pendidikan

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain ; 1) Masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, 2) Kebijakan yang bersifat sentralistik, 3) Lebih bersifat karikatif daripada transformatif, 4) Memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, 5) Orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat daripada produktivitas yang berkelanjutan, serta 6) Cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena beragamnya sifat tantangan yang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung.

2.1.9 Peran dan Tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan untuk mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan, dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai oleh Wakil Presiden. Adapun tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah :

1. Menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
2. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga.
3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah menurunnya jumlah penduduk miskin laki-laki dan perempuan dan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin secara bertahap yang meliputi:

1. Terpenuhinya kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau.
2. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang bermutu.
3. Tersedianya pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata.
4. Terbukanya kesempatan kerja dan berusaha.
5. Terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat.
6. Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman bagi masyarakat miskin.
7. Terbukanya akses masyarakat miskin dalam pemanfaatan SDA dan terjaganya kualitas lingkungan hidup.
8. Terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah.
9. Terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan.
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan.

Sebagai suatu langkah kinerja dari proses percepatan penanggulangan kemiskinan, TNP2K berupaya mengembangkan paradigma dalam proses penanganan penanggulangan kemiskinan yang sifatnya sektoral, guna mengarah pada pola penanganan yang bersifat multisektoral. Proses koordinasi yang dibangun telah mampu mengelompokkan program-program penanggulangan kemiskinan tersebut berdasarkan segmentasi masyarakat miskin penerima program sebagai berikut:

1. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai fokus dan tujuan yang berbeda dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu, setiap kelompok tersebut mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda. Ciri dan karakteristik setiap kelompok program penanggulangan kemiskinan mempunyai hubungan yang erat dengan cakupan kegiatan dan penerima manfaat yang menjadi target dari pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan. Cakupan kegiatan dan penerima manfaat program seringkali menjadi masalah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah data kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS adalah sebagai data resmi yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan tersebut, didapatkan melalui pengukuran sejumlah indikator yang disesuaikan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia (*local specify*).

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Samsubar Saleh (2002) melakukan penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan per provinsi di Indonesia, dengan judul penelitian “Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Teknik analisis menggunakan pendekatan regresi pada model estimasi menggunakan data

cross section. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa factor faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah:

1. Indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan per kapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah),
2. Investasi fisik pemerintah daerah,
3. Tingkat kesenjangan pendapatan,
4. Tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan,
5. Populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan,
6. Populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih dan
7. Krisis ekonomi.

Deny Tisna Amijaya (2008) melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2004”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis data panel, yaitu suatu metode mengenai gabungan dari data antar waktu (*time series*) dengan data antar individu (*cross section*), dengan menggunakan *fixed effect model*. Model yang digunakan adalah model persamaan regresi panel data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma (menggunakan *fixed effect model*), Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia dan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.

Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti (2008) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia, dengan judul penelitian “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif

dan analisis ekonometrika. Analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel maupun grafik, sedangkan analisis ekonometrika dilakukan dengan menggunakan panel data, bertujuan untuk menelaah pengaruh pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor lainnya terhadap kemiskinan. Model yang digunakan adalah model persamaan regresi sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak dapat dipecahkan hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata dengan mengharapkan terjadinya efek menetes ke bawah (*trickle down effect*). Pertumbuhan ekonomi memang merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) untuk mengurangi kemiskinan. Syarat kecukupannya (*sufficient condition*), misalnya laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian/pedesaan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi pula.

Ravi Dwi Wijayanto (2010) melakukan penelitian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya, dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait. Teknik analisis menggunakan analisis data panel, yaitu kombinasi antara deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section data*) menggunakan program Eviews6 dengan pendekatan efek tetap (*fixed effect*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel PDRB mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, variabel pendidikan (melek huruf) mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan variabel pengangguran mempunyai pengaruh negatif terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Melalui uraian diatas, maka dapat disederhanakan melalui ringkasan tabel berikut.

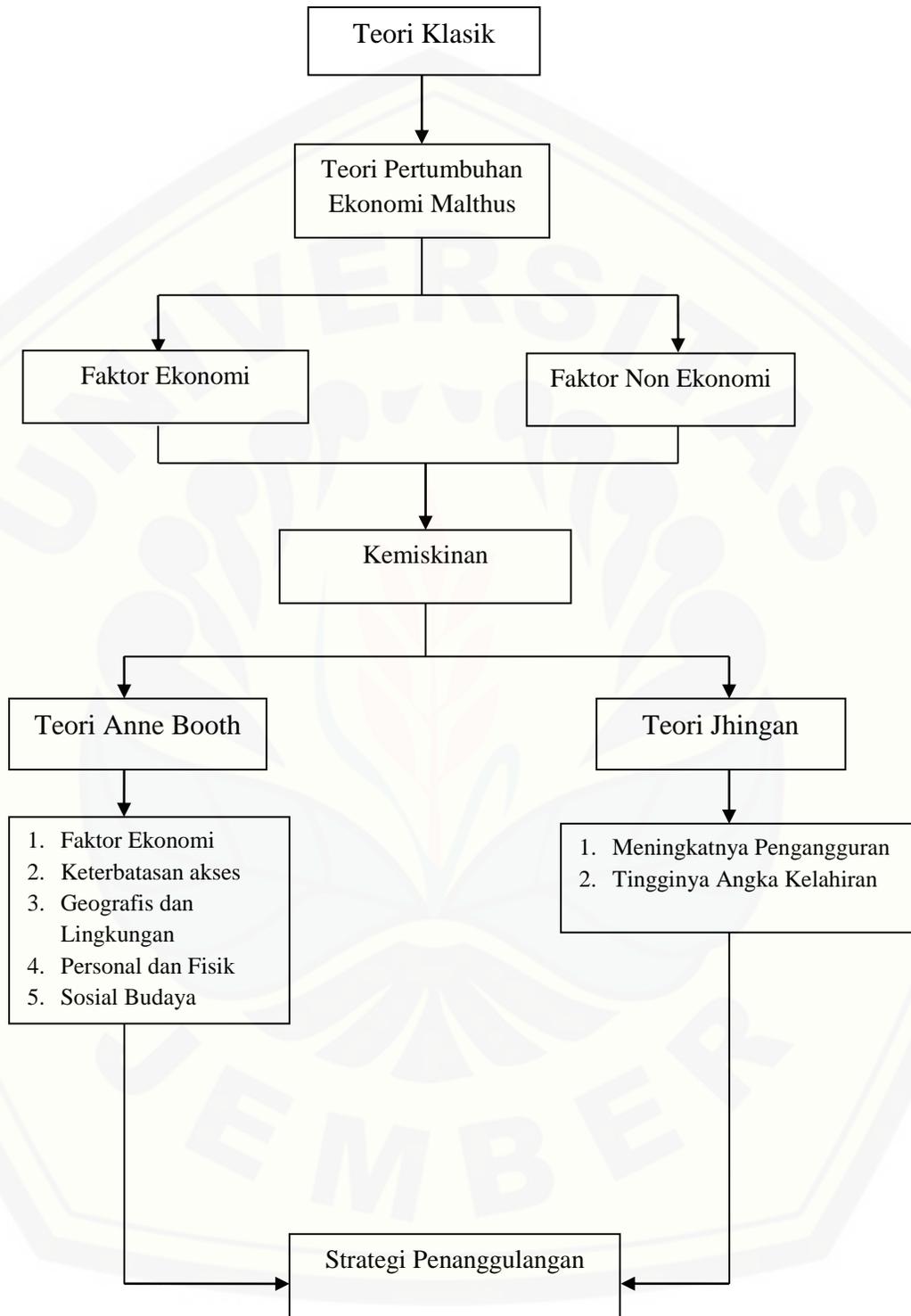
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil
1	Samsubar Saleh (2002)	Faktor-Faktor Penentu Tingkat Kemiskinan Regional Di Indonesia	Regresi Linear Berganda	Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan per propinsi di Indonesia adalah: 1. Indeks pembangunan manusia (terdiri dari pendapatan per kapita, angka harapan hidup, rata-rata bersekolah). 2. Investasi fisik pemerintah daerah. 3. Tingkat kesenjangan pendapatan. 4. Tingkat partisipasi ekonomi dan politik perempuan. 5. Populasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan. 6. Populasi penduduk tanpa akses terhadap air bersih 7. Krisis ekonomi.
2	Deny Trisma Amijaya (2008)	Analisis Pengaruh Ketidakmerataan Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2003 – 2004	Regresi Linear Berganda (Data Panel)	Variabel ketidakmerataan distribusi pendapatan berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia dan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah kemiskinan di Indonesia.
3	Hermanto Siregar, Dwi Wayuniarti (2008)	Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin	Analisis Deskriptif dan Regresi Linear Berganda (Data Panel)	Pertumbuhan Ekonomi tidak sepenuhnya mampu mengurangi jumlah Penduduk Miskin, terdapat faktor lain seperti laju inflasi serta laju populasi penduduk yang terkendali, industrialisasi pertanian/pedesaan yang tepat, serta akumulasi modal manusia yang relatif cepat, harus dipenuhi pula.

4	Andri Purnomo (2013)	Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Kabupaten Jember	Analisis Deskriptif dan AHP	Faktor faktor yang menjadi penyebab kemiskinan antara lain faktor kelembagaan, ekonomi, personal dan fisik, geografis dan lingkungan, sosial dan budaya.
---	----------------------	--	-----------------------------	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Teori Thomas Robert Malthus yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi akan optimal apabila melibatkan dua faktor yaitu ekonomi dan non ekonomi, dengan melibatkan dua faktor tersebut secara seimbang maka kesejahteraan akan meningkat yang artinya tingkat kemiskinan menurun. Teori Anne Booth tentang penyebab kemiskinan dalam masyarakat suatu daerah disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor geografis dan lingkungan, faktor personal dan fisik maupun faktor keterbatasan akses. Sedangkan Jhingan berpendapat bahwa kemiskinan di suatu daerah disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dan meningkatnya pengangguran. Berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut, dirumuskan strategi yang tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah kemiskinan.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap suatu permasalahan berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan pada umumnya penelitian ini berkaitan dengan opini dari individu, kelompok maupun organisasional. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada teori-teori pengukuran variable dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indrianto dan Supomo, 2002:13)

3.2 Unit Analisis, Populasi, dan Sampel

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin (RTM) di Kabupaten Jember. Populasi Rumah Tangga Miskin meliputi; rumah tangga hampir miskin, miskin dan sangat miskin.

Penentuan untuk analisis strategi dilakukan secara *purposive sampling* (sengaja), dengan kriteria luasan pemahaman terhadap topik (kepakaran/*expert*), meliputi regulator terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat. Jumlah sampel sebanyak 5 *key person* yang terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Jember
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat
4. Dinas Sosial Kabupaten Jember
5. Akademisi Universitas Jember

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2015, adapun lokasi penelitian di Kabupaten Jember dengan pertimbangan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi diantara kabupaten/ kota di Jawa Timur.

3.4 Data dan Metode Pengumpulan

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip yang dipublikasikan. (Indrianto dan Supomo, 1999:147)

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang akan diperoleh dalam penelitian ini melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, melalui instansi terkait yang diperoleh melalui website dan melalui kuesioner.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif Kuantitatif, yaitu mendeskripsikan data dan informasi yang disajikan dalam bentuk narasi. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu pemikiran ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

penggambaran secara tegas (*descriptive assertions*) tentang populasi yang menemukan distribusi dari beberapa atribut.

3.5.2 *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode analisis *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah metode pengambilan keputusan untuk suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kemudian dipecahkan, dikelompokkan dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Jamiel, Pyszczyński dan Shannon, 1999:173).. Analisis ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Dalam situasi yang kompleks, pengambilan keputusan tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan multifaktor dan mencakup berbagai jenjang kepentingan.

Metode ini pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, guru besar Wharton School, University of Pennsylvania pada tahun 1971 sampai 1975 (Saaty 1980:72). Saaty menyatakan bahwa AHP adalah suatu model untuk membangun gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi-asumsi dalam memperoleh pemecahan yang diinginkan, serta memungkinkan menguji kepekaan hasilnya. Dalam prosesnya, data utama yang diperlukan adalah persepsi manusia yang dianggap expert, dimana criteria expert bukan berarti jenius, pintar atau bergelar doctor maupun professor, melainkan lebih mengarah pada orang yang lebih mengerti, paham benar terhadap permasalahan yang dihadapi dalam suatu penelitian. AHP memasukkan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis yang bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan. Di lain pihak, proses AHP memberi suatu kerangka bagi partisipasi kelompok dalam pengambilan keputusan atau pemecahan persoalan. Kelebihan metode AHP antara lain sebagai berikut:

1. Memberi satu model tunggal, mudah dimengerti dan luwes untuk berbagai persoalan yang tidak terstruktur.
2. Mempunyai sifat kompleksitas dan saling ketergantungan, di mana dalam memecahkan persoalan dapat memadukan rancangan deduktif dan rancangan

berdasarkan sistem serta menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem

3. Elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat yang berlainan dan kelompok unsur yang serupa dalam setiap tingkat dapat disusun secara hierarki.
4. Dengan menetapkan berbagai prioritas dapat memberikan ukuran skala objek dan konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan serta menuntun pada suatu taksiran menyeluruh kebaikan setiap alternatif.
5. Memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka dan tidak memaksakan konsensus, tetapi mensistensi suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.
6. Memungkinkan orang memperhalus definisi pada suatu persoalan dan memepbaiki pertimbangan dan pengertian melalui pengulangan.

Dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan, metode Analytic Hierarchy Proses (AHP) memiliki beberapa prinsip dasar, antara lain :

1. *Dekomposisi*, yaitu memecahkan atau membagi problema yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke dalam bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur atau elemen yang saling berhubungan. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang akurat, dilakukan pemecahan terhadap unsur-unsurnya sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lanjutan, sehingga didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan;
2. *Comparative Judgment*, yaitu membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari Analytic Hierarchy Proses (AHP), karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas elemen-elemennya. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matrik perbandingan berpasangan (*matrik pairwise comparasion*) memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria;

3. *Synthesis of priority*, dari setiap matrik pairwise comparison eigen vector mempunyai ciri untuk mendapatkan prioritas-prioritas lokal. Karena matrik pairwise terdapat dalam setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki;
4. *Logical Consistency*, yaitu konsistensi memiliki dua makna. Pertama, bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keragaman dan relevansinya. Kedua, tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.

Pendekatan Analytic Hierarchy Proses (AHP) menggunakan skala saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting” ini berarti bahwa nilai atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobotnya 9 menggambarkan kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya.

Tabel 3.1 Skala Banding Secara Bersamaan

Tingkat Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen sama penting	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya

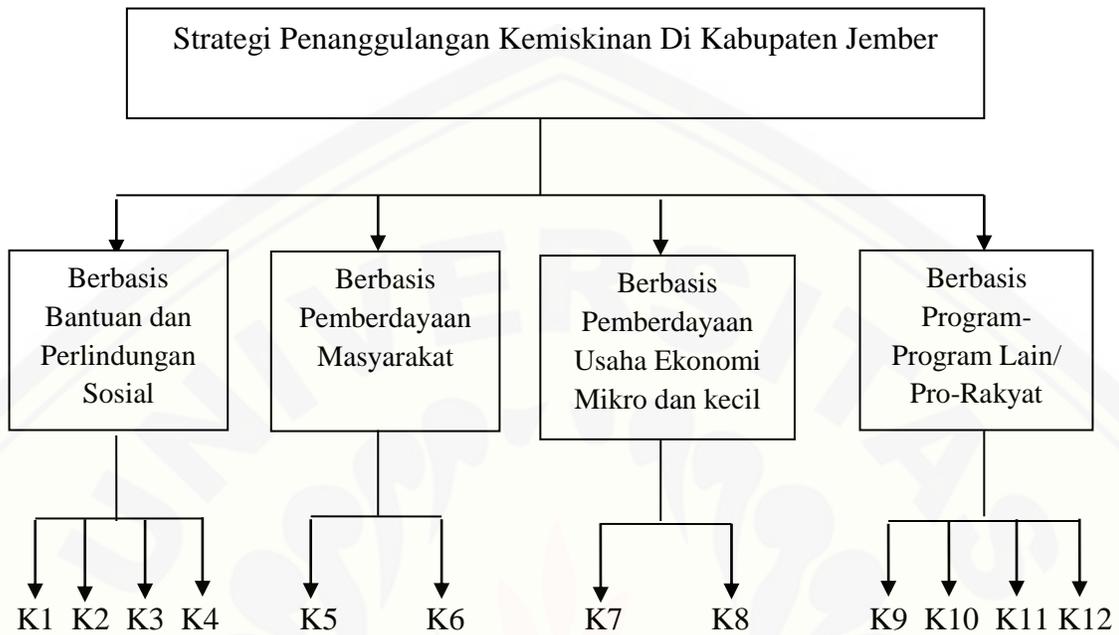
7	Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen lainnya	Bukti yang mendukung elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2, 4, 6, 8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas I mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i	

Dalam metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonverssi faktor-faktor *intangibile* (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat diperbandingkan. Tahapan dalam analisis data (Saaty, 1980) antara lain :

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali oleh tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria paling bawah.
3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relative terhadap setiap elemen perbandingan berpasangan yang digunakan dalam Analytic Hierarchy Proses (AHP) berdasarkan "*judgment*" atau pendapat para responden yang dianggap sebagai "*key person*", meliputi pengambilan keputusan, para pakar, dan orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.
4. Matrik pendapat gabungan, merupakan matrik baru yang elemen-elemennya berasal dari geometric elemen matrik pendapat individu yang nilai rasio inkonsistennya memenuhi syarat.
5. Pengolahan horisontal ; perkalian baris, perhitungan vector prioritas atau vector ciri (eigen vector); perhitungan akar ciri (eigen value) maksimum; dan perhitungan rasio inkosistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden.
 6. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh tiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama. Revisi pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ($> 0,1$). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan.

Dalam kerangka pendekatan untuk mendapatkan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan studi AHP, disusun struktur permasalahan yang akan dilakukan permintaan pendapat kepada para responden seperti pada gambar 3.1



Gambar 3.1
Bagan Proses Hirarki Analitik Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Keterangan :

- K1 = BPJS Kesehatan
- K2 = Bantuan Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin)
- K3 = Bantuan Beasiswa Pendidikan Untuk Keluarga Miskin (BSM)
- K4 = Program Keluarga Harapan (PKH)
- K5 = Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
- K6 = Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif
- K7 = Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- K8 = Kredit Usaha Bersama (KUBE)
- K9 = Sosialisasi Pengenalan Teknologi dan Informasi
- K10 = Literasi Keuangan Untuk Masyarakat Pedesaan dan Pinggir Perkotaan

K11 = Kendaraan Angkutan Umum dan Listrik Murah

K12 = Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan

3.6 Ruang Lingkup dan Batasan

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, maka penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut :

Indikator kemiskinan yang digunakan mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember dengan kriteria antara lain :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m per kapita.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu dan kayu.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbai kayu berkualitas rendah dan tembok tanpa plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi, sungai dan air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging, susu dan ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas atau Poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga adalah tidak sekolah, tidak tamat SD atau hanya lulusan SD.